

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi adalah proses pengelolaan dan pengaturan berbagai kegiatan dan dokumen yang berkaitan dengan pemerintahan suatu wilayah. Hal ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data yang diperlukan untuk menjalankan fungsi – fungsi pemerintahan dengan efisien. Administrasi juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Pengelolaan administrasi dimulai dari tingkat tertinggi hingga menurun ke tingkat desa, administrasi di desa merupakan tingkat terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki otonomi dan mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, administrasi desa melibatkan berbagai kegiatan seperti pengelolaan keuangan desa, pengelolaan data penduduk, pengaturan perizinan, pemeliharaan infrastruktur desa, serta pembangunan dan pengembangan desa wisata.

Desa merupakan wilayah yang mempunyai kekayaan serta keanekaragaman setiap daerahnya. Setiap daerah tersebut mempunyai keunggulan tersendiri termasuk pada potensi alamnya yang tentunya hal ini berdampak sangat baik bagi sektor pariwisata. Hal ini jika dikelola dengan baik bukan tidak mungkin bisa mensejahterakan masyarakat kalangan menengah ke bawah agar hidup menjadi sejahtera. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menjadi potensi luar biasa untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata. Dengan optimalisasi

pemanfaatan yang bijaksana dan sesuai dengan potensinya, potensi alam ini mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan negara (Wisata et al., 2014).

Kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang menjadi warisan Indonesia tidak hanya menjadi suatu daya tarik, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat dalam pembangunan sektor pariwisata. Negara Indonesia dengan segala potensinya yang melimpah menawarkan ragam keindahan alam, keunikan budaya, serta kekayaan sejarah yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dalam rangka menjadikan potensi ini lebih menarik bagi wisatawan asing, pemerintah memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi, menggali, serta mengelola potensi tersebut secara optimal.

Peran pemerintah bukan hanya terbatas pada menggali potensi pariwisata, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ini. Kebijakan yang bijak dan berkelanjutan sangat penting untuk mengarahkan perkembangan pariwisata secara terencana dan berkelanjutan. Selain itu, perlu upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal akan potensi yang ada di sekitar mereka. Edukasi, pelatihan, serta peningkatan pemahaman akan nilai-nilai kultural dan keindahan alam lokal dapat menjadi kunci dalam memotivasi masyarakat untuk lebih terlibat dalam mengembangkan dan melestarikan potensi wisata di wilayahnya. Dengan demikian, melalui sinergi antara peran pemerintah dan kesadaran masyarakat, potensi pariwisata Indonesia dapat dikembangkan secara holistik,

memberikan manfaat ekonomi dan juga meningkatkan kebanggaan serta kesadaran akan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia(Kurnia, 2015).

Sumber daya alam yang terdapat di Indonesia sangatlah banyak, sehingga dapat dimaksimalkan menjadi salah satu objek pariwisata, yang jika dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan potensinya maka bisa berdampak terhadap perekonomian yang bisa meningkatkan pendapatan negara. Kekayaan alam dan keberagaman yang dimiliki oleh Negara Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan pariwisata agar dapat lebih menarik perhatian wisatawan asing. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam menggali potensi dan membuat kebijakan terhadap pengembangan pariwisata, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat lokal untuk lebih menggali potensi yang ada di wilayahnya untuk dikembangkan.

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berasal dari alam yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, karena semakin banyak sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut seharusnya wilayah tersebut semakin berkembang. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam ini terkadang tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Dengan melimpahnya sumber daya alam sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam tersebut agar bisa lebih bermanfaat salah satunya dengan cara menjadikan sumber daya alam sebagai wilayah untuk pariwisata dalam rangka membantu pembangunan suatu wilayah agar masyarakat wilayah sekitar mendapatkan

hasil serta manfaatnya. Adanya undang – undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. Dengan adanya undang – undang tentang desa maka memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengembangkan potensi desa nya, dengan cara menggali potensi apa saja yang akan dikembangkan. Salah satu potensi wisata yang dapat berguna bagi masyarakat lokal yaitu dengan adanya pengembangan desa wisata yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah sendiri telah membuat kebijakan mengenai pengembangan desa wisata tersebut mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Sulistiyadi, 2019).

Kemudian Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata yang berisi tentang pemetaan serta potensi desa yang dapat dikembangkan, desa yang dapat diberdayakan menjadi destinasi wisata, menyediakan fasilitas terhadap destinasi wisata, dan membuat informasi desa wisata dengan menggunakan sistem, selain itu terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 - 2025, serta terdapat juga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 yang membahas Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata.

Adanya kebijakan tersebut memperjelas bahwa pemerintah pusat hingga pemerintah daerah serius dalam rangka mengembangkan pariwisata berkelanjutan agar dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, terlebih lagi pengembangan desa wisata yang mulai dilakukan di berbagai daerah yang bertujuan untuk lebih memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah pedesaan yang bisa menjadi alternatif objek wisata bagi wisatawan yang berasal dari perkotaan maupun wisatawan mancanegara sekalipun, tentunya hal ini dapat memicu meningkatnya ekonomi yang berkelanjutan.

Desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang memberikan penawaran keseluruhan suasana yang memperlihatkan kehidupan pedesaan baik dari bidang ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian masyarakat serta kegiatan perekonomian yang menarik dan juga berpotensi untuk dikembangkan dalam kegiatan pariwisata (Fandeli & Muhammad, 2005). Adanya Desa Wisata merupakan bentuk penerapan dari pembangunan pariwisata yang berfokus terhadap masyarakat dalam jangka waktu yang berkelanjutan, dengan desa wisata ini diharapkan adanya pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang saling berkaitan. Selain itu, hadirnya desa wisata dapat menjadikan tempat wisata akan lebih memiliki nilai budaya pedesaan sehingga dengan adanya pengembangan desa wisata ini dapat memiliki nilai budaya tanpa harus mengubah atau bahkan merusaknya, desa wisata juga bisa menjadi alternatif wisata bagi wisatawan yang berasal dari perkotaan. Adanya desa wisata diprediksi dapat menjadi peluang untuk masa yang akan datang karena potensi yang dapat dikembangkan sangat luar biasa, dengan demikian pemerintah melihat bahwa desa wisata memiliki potensi yang besar dan

membuat rencana untuk pengembangannya. Dalam mengembangkan desa wisata ini, masyarakat sekitar mempunyai peran penting karena akan menjadi keunikan dalam pariwisata tersebut karena setiap sumber daya manusia di setiap tempat akan berbeda, ini yang akan menambah nilai keunikan dalam desa wisata tersebut, dan keberhasilan adanya desa wisata juga tergantung bagaimana masyarakat sekitar dapat menerima dan mendukung adanya desa wisata yang dibangun di daerahnya.

Pengembangan desa wisata dilaksanakan pada potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut, dengan demikian adanya pengembangan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya dari berbagai sektor seperti dari industri kerajinan, industri jasa atau perdagangan dan industri lainnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, ini bisa menjadi faktor untuk menarik wisatawan agar datang berkunjung ke desa tersebut selain itu juga ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan bisa juga mengurangi angka pengangguran dalam Damanik (2009). Dalam pelaksanaannya memiliki prinsip pengembangan dari produk desa wisata tersebut, diantaranya:

- a) Keaslian : kegiatan atau atraksi yang diberikan merupakan kegiatan asli yang terjadi di masyarakat desa tersebut
- b) Masyarakat sekitar : adalah kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat serta menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat
- c) Keterlibatan masyarakat : masyarakat dapat terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan di desa wisata

- d) Sikap dan nilai : harus tetap menjaga nilai yang dipercayai oleh masyarakat serta sesuai dengan nilai dan juga norma yang ada di desa setempat
- e) Konservasi serta daya dukung: wisatawan tidak merusak dari segi apapun baik dari segi fisik ataupun sosial masyarakat yang sesuai dengan daya dukung desa dalam menerima wisatawan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dalam hal industri pariwisata yaitu Jawa Barat. Banyak daerah di wilayah Jawa Barat yang memiliki objek wisata baik objek wisata buatan maupun objek wisata alam, salah satunya adalah wilayah Kabupaten Bandung yang ramai dikunjungi serta menjadi perbincangan bagi wisatawan karena banyaknya objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung, hal ini sejalan dengan rencana yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan desa wisata yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Peran pariwisata dalam rangka pembangunan sangat besar, peran tersebut yaitu memperluas serta menciptakan lapangan kerja baru dan juga bisa menurunkan angka pengangguran dengan lapangan kerja yang tersedia karena adanya desa wisata serta industri pariwisata bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi, sehingga mampu dijadikan sebagai modal dalam pembangunan baik tingkat lokal, regional ataupun nasional.

Wilayah Kabupaten Bandung sendiri terkenal dengan keindahan alam yang memiliki potensi untuk dapat dijadikan objek pariwisata, mulai dari desa Pangalengan dan Ciwidey yang sudah dari lama terkenal dengan objek wisatanya dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Namun tidak hanya dua desa tersebut

yang memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata, banyak desa lain yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata daerahnya salah satunya yaitu Desa Baros yang bertempat di Kecamatan Arjasari.

Di Desa Baros ini terdapat kearifan lokal yang masih terjaga yang tentunya bisa menjadi daya tarik tersendiri, tentunya ini dapat menjadi potensi yang bisa dikembangkan dalam rangka pengembangan desa wisata agar lebih dikenal oleh wisatawan. Tentunya hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila semua pihak yang terkait saling bersinergi untuk mengembangkan wilayahnya, namun pembangunan desa wisata tidak hanya terfokus pada pengembangan wisatanya saja, tetapi juga dengan dibangunnya desa wisata dapat lebih mempromosikan produk home industry tentunya ini sangat berdampak baik terhadap home industry tersebut karena akan terbantu dalam promosinya, tentunya dengan demikian banyak potensi yang dapat dikembangkan diantaranya pada potensi alam dan juga potensi di bidang budaya.

Desa wisata yang terletak di desa Baros ini termasuk desa wisata kategori berkembang, meskipun desa wisata yang terletak di Desa Baros ini terbilang baru namun perkembangannya cukup pesat. Desa wisata ini termasuk kedalam kategori berkembang karena perkembangannya yang cukup cepat, namun masih terdapat potensi yang bisa dikembangkan, pengembangan sarana dan prasarana yang masih bisa ditingkatkan, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Serta perlu juga sosialisasi bagi masyarakat terkait desa

wisata dan juga pelatihan bagi masyarakat yang mengelola destinasi wisata agar lebih kreatif sehingga dapat menarik perhatian dari wisatawan agar datang ke desa tersebut.

Tabel 1. 1
Data Destinasi Wisata di Desa Baros

No	Destinasi Wisata	Alamat	Bidang Usaha	Keterangan
1	Hutan Pinus Mega Tutupan	Kp. Legoksura RW 16	Daya Tarik Wisata	Pengelolaan Wisata Agro
2	Sungai Citalutug	Kp. Cibayongbong RW 6	Daya Tarik Wisata	Pengelolaan Wisata Agro
3	Kolam Renang Sampalan Indah	Kp. Pakusorok RW 9	Rekreasi dan Hiburan	Usaha Jasa Gelanggang Renang
4	Kesenian Buhun Wayang Serok	Kp. Cipeteuy	Daya Tarik Wisata	Pengelolaan Kesenian Tradisional
5	Pamidangan (Atraksi	Kp. Pakusorok RW 9	Rekreasi dan Hiburan	Pengelolaan Budaya Tradisional

	Ketangkasan Adu Domba)			
--	---------------------------	--	--	--

Sumber : Pengurus Desa Wisata Desa Baros

Berdasarkan data dari tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwasanya destinasi wisata di Desa Baros terdapat 5 titik dan masih ada potensi lain yang dapat dikembangkan dari Desa Baros ini untuk dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke Desa Baros ini. Desa Wisata yang dimulai pada tahun 2021 ini terbilang sudah cukup baik, namun masih bisa terus untuk ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi baik itu dari pelayanannya, masyarakatnya hingga infrastruktur yang terdapat di objek wisata bisa terus diperbaiki agar memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung, diharapkan dalam beberapa tahun kedepan desa wisata yang kini statusnya sudah dalam kategori berkembang dapat terus berkembang menjadi desa wisata yang masuk dalam kategori maju, dan bukan tidak mungkin jika pengelolaannya berjalan dengan sangat baik dan konsisten bisa menjadikan desa wisata ini menjadi desa wisata yang berkategori mandiri.

Menurut KEMENPAREKRAF dalam pedoman Desa Wisata 2019, untuk menentukan klasifikasi desa wisata terdapat 5 indikator dasar yang menjadi acuan untuk menentukan kategorinya, diantaranya :

- 1) Jumlah kunjungan
- 2) Industri pariwisata yang berkembang
- 3) Kesiapan skill dan SDM

- 4) Diversifikasi produk dan aktivitas wisata
- 5) Amenitas pariwisata

Di Desa Baros sendiri kelima indikator ini sudah mulai bisa tercapai namun tentunya masih terdapat kekurangannya dikarenakan desa wisata yang ada masih terbilang baru dan masih dikategorikan sebagai kategori berkembang. Salah satu kekurangan yang terdapat pada Desa Wisata Desa Baros ini yaitu kesiapan skill serta sumber daya manusianya yang masih belum maksimal tentunya ini dapat menjadi suatu permasalahan, terbukti karena masih kurangnya kreativitas pengelola objek wisata yang berada di Desa Baros, memang tidak semua pengelola kurang memiliki kreativitas dalam pengembangan objek wisatanya namun masih ada pengelola yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi kreativitasnya demi perkembangan objek wisata yang dapat mendorong perkembangan desa wisatanya itu sendiri.

Selain itu masih kurangnya promosi desa wisata membuat wisatawan masih belum mengetahui keberadaannya serta apa saja yang dapat ditawarkan oleh Desa Wisata Baros ini, padahal jika dikemas dengan baik promosi yang dilakukan di media sosial bukan tidak mungkin dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi, selain itu jangkauan promosi yang dilakukan akan lebih luas lagi. Dengan demikian dibutuhkan pelatihan khusus bagi para masyarakat yang menjadi pengelola desa wisata agar bisa menjadi lebih kreatif dan dalam mengembangkan desa wisata ini dapat berjalan dengan baik serta konsisten sehingga menjadikan desa wisata yang dikelola dapat termasuk kepada desa wisata kategori mandiri.

Terdapat model SDM pariwisata yang berkompotensi yang harus memiliki tiga aspek utama yaitu, *attitude* (sikap), *skill* (keterampilan), dan *knowledge* (pengetahuan) yang relevan dan mampu menunjang pencapaian sasaran dari target yang telah diberikan (Glueck & R.J., 1998). *Attitude*, *Skill* dan *Knowledge* adalah tiga kompetensi yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Namun apa yang terjadi jika ketiga hal tersebut tidak semuanya dimiliki oleh setiap individu. Bagaimana pentingnya kombinasi ketiga hal ini terutama dalam usaha wisata terutama dalam hal pengembangan serta pengelolaan pariwisata jika tidak memiliki ketiga aspek tersebut dapat dikatakan proses dalam pengembangan serta pengelolaannya akan terhambat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, menduga belum optimalnya pengembangan Desa Wisata Baros karena masih kurangnya kesiapan skill serta SDM yang mengelola objek wisata, hal ini berhubungan dengan prinsip *co-operation* yang dalam penjelasannya pengelolaan dilakukan secara bersama oleh pengelola hingga masyarakat, ini membuktikan jika pengelola belum memiliki skill yang baik tentunya akan berpengaruh terhadap pengembangan desa wisata karena skill yang dimiliki oleh SDM bisa berupa kreativitas dalam mengembangkan serta mengelola Desa Wisata Baros.

Tabel 1. 2
Data Pengelola Destinasi Wisata Desa Baros

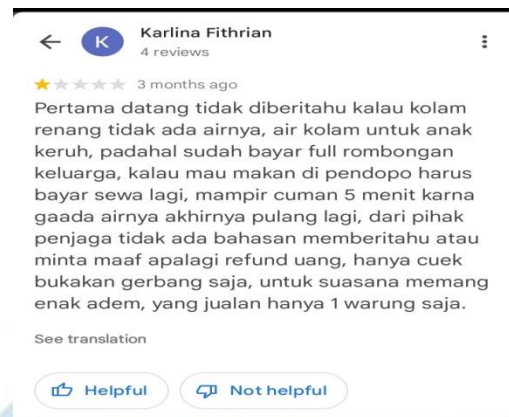
No	Nama	Destinasi Wisata	Pengalaman Sebelum Mengelola Destinasi Wisata
1	Tedi Kustandi	Hutan Pinus Mega Tutupan	Tergabung di perhutani
2	Atep	Sungai Citalutug	Petani
3	Hari	Kolam Sampalan Indah	Petani
4	Adang	Wayang Serok	Seniman
5	Wawan	Pamidangan	Peternak

Sumber : Pengurus Desa Wisata

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jika pengelola destinasi wisata tidak memiliki latar belakang dalam mengelola pariwisata, karena kebanyakan pengelola yang ada dari latar belakang petani. Dengan demikian perlu diadakan pelatihan dan pengembangan skill pengelola agar dalam melaksanakan pengembangan serta pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan juga muncul ide yang membuat percepatan dalam pengembangan desa wisata.

Gambar 1. 1

Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Pengelola Destinasi Wisata



Sumber : Google Maps Sampalan Indah

Berdasarkan gambar diatas, menandakan bahwa pengelola desa wisata yang masih kurang kesiapan skill nya, karena jika SDM telah memiliki kesiapan skill hal tersebut tidak akan terjadi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas topik mengenai pengelolaan serta pengembangan desa wisata di Kabupaten Bandung khususnya di Desa Baros Kecamatan Arjasari yang merupakan desa wisata kategori berkembang, adapun judul yang penulis angkat yaitu “PENGELOLAAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA DI KABUPATEN BANDUNG (Studi Pada Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi bahwa masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya kesiapan skill serta Sumber Daya Manusia, karena hal tersebut dapat menghambat pengelolaan serta pengembangan desa wisata. Oleh sebab itu pendampingan dari pemerintah dan juga pelatihan bagi SDM yang mengelola desa wisata ini sangat diperlukan karena akan sangat berguna bagi pengelolaan serta pengembangan desa wisata itu sendiri.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan pariwisata yang melibatkan partisipasi dan kepemilikan bersama di desa wisata desa Baros ?
2. Bagaimana pengelolaan pariwisata dalam kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait di desa wisata desa Baros ?
3. Bagaimana pengelolaan pariwisata serta tanggungjawab dalam menjaga dan melestarikan desa wisata di desa wisata desa Baros ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pariwisata yang melibatkan partisipasi semua yang terlibat, mengetahui kerja sama apa saja yang telah dilakukan semua pihak, serta mengetahui tanggungjawab dalam menjaga dan melestarikan desa wisata yang mengacu terhadap *prinsip co-ownership, co-operation, serta co-responsibility* yang dilakukan pada desa wisata di Desa Baros Kec. Arjasari.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu dan juga manfaat terhadap pengelolaan serta pengembangan desa wisata di Kabupaten Bandung. Serta dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya jika mengadakan penelitian yang sama tentang pengembangan desa wisata, dan tentunya menambah wawasan juga bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang baru dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan serta pengembangan desa wisata, dan bagi pemerintah daerah hasil dari penelitian ini (Huberman & Michael, 2009) dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan kedepannya dalam perumusan kebijakan terhadap pengelolaan pengembangan desa wisata di Kabupaten Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian yang dilakukan adalah mengenai pengelolaan potensi desa wisata di Desa Baros, pada penelitian ini penulis mengkaji penelitian ini menggunakan teori dari Terry (2014:2) yang merupakan teori manajemen pengelolaan yang mendefinisikan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Applied Theory yang digunakan adalah teori perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menjelaskan tentang bagaimana prinsip pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang memiliki tiga prinsip yaitu co-ownership, co-operation, dan co-responsibility. (Sulistiyadi, n.d.) Sulistiyadi (2021)

Ketiga prinsip tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut, yaitu :

1. *Co-ownership* mengacu pada konsep bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan melibatkan partisipasi serta kepemilikan bersama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta. Dalam hal ini, semua pihak memiliki tanggung jawab dan kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan khususnya pada pengembangan desa wisata di desa Baros.
2. *Co-operation* mengacu pada kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengembangan, serta pengelolaan pariwisata. Kerjasama ini dapat melibatkan dialog terbuka, pertukaran ide atau informasi, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, industri pariwisata, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan serta pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan.
3. *Co-responsibility* mengacu pada tanggung jawab bersama dalam menjaga serta melestarikan sumber daya alam, budaya, dan lingkungan yang terlibat dalam pariwisata. Semua pemangku kepentingan harus bertanggung jawab dalam

mengelola pariwisata dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan(Sulistiyadi, 2019).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, teori perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, melestarikan sumber daya alam dan budaya, serta meminimalkan dampak negative terhadap lingkungan.

Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran

